

TESIS

**EKSISTENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN
KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN
KEPALA DAERAH**



Oleh:

ANIS FAUZAN

NIM. 2410622028

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
JAKARTA**

2026

HALAMAN JUDUL

EKSISTENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Magister Pada Program Studi Hukum Program Magister

Disusun dan diajukan oleh:

ANIS FAUZAN

NIM. 2410622028

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA
JAKARTA
2026**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

EKSISTENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Disusun dan diajukan oleh:

ANIS FAUZAN

NIM. 2410622028

Disetujui untuk Tahap UJIAN TESIS

Pada Tanggal 07 Juli 2026

Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Irsyal Marsal, S.H., M.H.

NIDN 0306036603

Pembimbing 2



Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum.

NIDK 8918370023

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Anis Fauzan
NIM : 2410622028
Program Studi : Magister Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Tesis yang Berjudul

EKSISTENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

adalah benar-benar karya saya sendiri. Adapun yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Integritas Akademik dalam Menghasilkan Karya Ilmiah dan Peraturan Perundang- Undangan yang berlaku.

Jakarta, 07 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,


Anis Fauzan
NIM. 2410622028



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anis Fauzan

NIM : 2410622028

Program Studi : Magister Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalti Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“ EKSISTENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH”** beserta perangkat yang ada. Dengan Hak Bebas Royalti ini Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 7 Juli 2026

Yang Membuat Pernyataan,



Anis Fauzan

NIM. 2410622028

HALAMAN PENGESAHAN

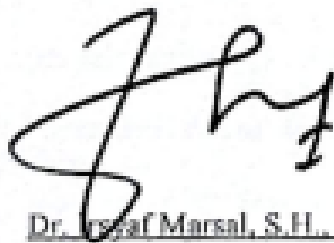
EKSISTENSI PEMBENTUKAN BADAN PERADILAN KHUSUS DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

Disusun dan diajukan oleh
ANIS FAUZAN
NIM. 2410622028

Telah diujikan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas
Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta
Pada Tanggal 07 Juli 2026
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat Kelulusan

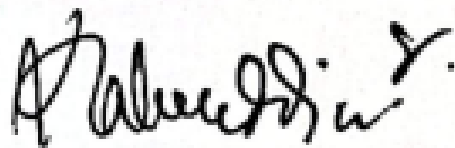
Menyetujui:

Pembimbing 1



Dr. Yusuf Marsal, S.H., M.H.
NIP. 196603062024211001

Pembimbing 2



Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum.
NIDK. 8918370023

Koordinator Program Studi
Magister Hukum



Dr. Muhammad Helmi Fahrozi,
S.H.I., S.H., M.H.
NIP. 198910192025211048

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Suberianto, S.H., LL.M.
NIP. 197006022027211004

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul **“Eksistensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”** yang menjadi salah satu syarat dalam memperoleh gelas Magister Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Tesis ini disusun dengan maksud untuk mengkaji secara komprehensif dan holistik mengenai fragmentasi kelembagaan penyelesaian sengketa pilkada pada lingkup nasional dengan menganggot ide pembentukan pengadilan khusus pilkada sebagai solusi konkrit dalam penyelesaian sengketa *one door system* sehingga penyelesaian sengketa pilkada dapat lebih berkepastian dan berkeadilan hukum. Kemudian dalam tesis ini, penulis memberikan sudut pandang komparatif mengenai penyelesaian sengketa pilkada dengan metode satu pintu di berbagai negara, seperti Brazil dan Meksiko yang sudah mengimplementasikannya lebih dahulu dan menjadi batu uji penulis dalam menemukan solusi di sistem hukum penyelesaian sengketa pilkada di Indonesia.

Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak mungkin pencapaian ini dapat diraih tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Anter Venus, MA.Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas akademik kepada penulis selama menempuh studi.
2. Dr. Suherman, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, yang telah memberikan arahan dan kebijakan yang mendukung proses pembelajaran.
3. Dr. Helmi Fahrozi selaku Kaprodi S2 Hukum UPN Veteran Jakarta.
4. Dr. Irsyaf Marsal, S.H., M.H., yang telah sabar membimbing selaku pembimbing pertama, mengantarkan penulis hingga tahapan penyelesaian penulisan tesis ini.
5. Dr. Kaharuddin, S.Ag., M.Hum., yang telah membimbing selaku pembimbing kedua, mengantarkan penulis hingga tahapan penyelesaian penulisan tesis ini.
6. Prof. Dr. Wicipto Raharjo, selaku penguji dalam sidang tesis telah banyak memberikan perpektif dan masukan yang luar biasa terhadap penulisan tesis ini.
7. Para Dosen Fakultas Hukum di Program Studi Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu dan wawaasan hukum yang bermanfaat bagi saya di kemudian hari.
8. Julisnaina Nur Syamkumalwati, S.H.I., M.H.,. Zafira dan seluruh keluarga besar yang selalu menemani, memotivasi dalam menempuh pendidikan magister hukum hingga dapat menyelesaikan sesuai dengan tenggat waktu.

9. Seluruh staf administrasi Fakultas Hukum, yang telah membantu dalam proses akademik dan administratif selama penulis menempuh pendidikan
10. Teman Penulis di program studi magister hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah menjadi teman diskusi dan berbagi semangat Mas Haris, Mas Fauzan, Mas Rizki dan yang lainnya.
11. Rekan – rekan kerja penulis di Ideality Law Firm yang secara sukarela memberikan masukan dan berbagai perpektif terkait Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini jauh dari sebuah kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis terbuka terhadap berbentuk kritik maupun saran yang membangun demi perbaikan masa yang akan datang. Semoga dengan dibuatnya tesis ini dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, bagi pengembangan ilmu hukum dan menjadi sumbangsih kecil dalam perbaikan sistem hukum pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Jakarta, 07 Juli 2026

Anis Fauzan
NIM. 2410622028

ABSTRAK

Tesis ini disusun oleh Anis Fauzan dengan Nomor Induk Mahasiswa 2410622028, mengangkat judul "Eksistensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah". Penulisan penelitian ini dilakukan di bawah arahan dan bimbingan tim pembimbing materi penulisan tesis pada Program Studi Magister Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah yang berlaku saat ini di Indonesia yang dinilai masih terfragmentasi dan belum optimal. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan model institusional ideal dari badan peradilan khusus dalam menangani sengketa Pilkada di Indonesia guna mewujudkan keadilan elektoral yang substantif. Latar belakang penelitian ini menyoroti kompleksitas sengketa Pilkada, mulai dari beban perkara di Mahkamah Konstitusi hingga konflik norma pasca Putusan MK No. 85/PUU-XX/2022 yang menghapus sifat sementara kewenangan MK, serta terabaikannya keadilan substantif akibat formalisme hukum.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang didukung oleh studi perbandingan hukum dengan negara lain. Hasil penelitian pertama menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa Pilkada saat ini terfragmentasi secara rigid antara Mahkamah Konstitusi (hasil), Bawaslu dan

PTUN (proses), serta DKPP (etik), yang mengakibatkan inefisiensi dan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan. Hasil penelitian kedua merekomendasikan PTUN sebagai lembaga peradilan yang mengintegrasikan penyelesaian sengketa proses, etik, dan hasil pilkada melalui sistem satu pintu (*one-door system*) dengan putusannya bersifat *inkracht* dan tidak dapat diajukan upaya hukum lainnya, layaknya model di Brazil dan Meksiko dengan melakukan perubahan dan penyesuaian pada perubahan UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN dan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. *Novelty* dari penelitian ini menawarkan konsep reposisi fungsi adjudikasi dari Bawaslu dan DKPP kembali kepada rumpun kekuasaan kehakiman guna mengembalikan kedudukan sebenarnya dari Bawaslu sebagai lembaga negara bantu (*state auxiliary organ*) yang murni menjalankan fungsi pengawasan dan pengumpulan bukti, bukan sebagai pemutus sengketa.

Kata Kunci: Sengketa Pilkada, Badan Peradilan Khusus, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Keadilan Elektoral.

ABSTRACT

This thesis was written by Anis Fauzan, Student ID Number 2410622028, under the title “*Eksistensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.*” This research was conducted under the direction and guidance of the thesis advisory committee at the Master of Law Program, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

This study aims to explore the current mechanisms for resolving local head election disputes in Indonesia, which are considered to be fragmented and suboptimal. Additionally, this study aims to analyze and formulate an ideal institutional model for a special judicial body to handle local head election disputes in Indonesia in order to achieve substantive electoral justice. The background of this research highlights the complexity of local election disputes, ranging from the caseload at the Constitutional Court to normative conflicts following Constitutional Court Decision No. 85/PUU-XX/2022, which removed the temporary nature of the Constitutional Court’s authority, as well as the neglect of substantive justice due to legal formalism.

The research method employed is normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach, supported by comparative legal studies with other countries. The findings of the second study recommend the Administrative Court (PTUN) as a judicial institution that integrates the resolution of disputes regarding the process, ethics, and results of regional elections through a one-door system, with its decisions being final and binding and not subject to further legal

action, similar to the models in Brazil and Mexico, by making amendments and adjustments to Law No. 5 of 1986 on the PTUN and Law No. 7 of 2017 on Elections. The novelty of this study lies in proposing the repositioning of the adjudicative functions of the Election Supervisory Agency (Bawaslu) and the Election Dispute Settlement Commission (DKPP) back within the judicial branch to restore Bawaslu's true status as a state auxiliary organ that purely performs oversight and evidence-gathering functions, rather than acting as a dispute adjudicator.

Keywords: Local Head Election Dispute, Special Judicial Body, Constitutional Court, Supreme Court, Electoral Justice.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat penelitian.....	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II.....	15
TINJAUAN PUSTAKA	15

A. Kajian Teoritis.....	15
1. Teori Kelembagaan Negara.....	15
2. Teori Kekuasaan Kehakiman	24
B. Kerangka Pikir	35
C. Definisi Operasional.....	38
BAB III	42
METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	42
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	44
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	47
D. Analisis Bahan Hukum	47
BAB IV	48
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah yang Berlaku Saat Ini di Indonesia	48
B. Model Institusional Ideal dari Badan Peradilan Khusus dalam Menganani Sengketa Pilkada di Indonesia.....	66
BAB V.....	88
PENUTUP	88
A. KESIMPULAN.....	88
B. SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Orisinalitas Penelitian	15
Tabel 2. Perbandingan Konsep Penyelesaian Sengketa antara Indonesia, Brazil, dan Meksiko	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Kerangka Berpikir Penelitian

36